KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Salurkan Bansos Lewat BUMN Aja
Tanggal : Kamis, 04 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Agar Lebih Efektif Dan Tepat Sasaran

Salurkan Bansos Lewat BUMN Aja

Senayan mendorong agar Program Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat miskin cukup disalurkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan agar program bansos yang saat ini mencapai Rp 400 triliun benar-benar efektif dan tepat sasaran.

ANGGOTA Komisi VI DPR Darmadi Durianto meng[illegible] program (bansos) jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu. Karena, program ini telah menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan hidup masyarakat kelas bawah.

Meski dalam pelaksanaannya masih kerap terdengar berbagai macam kekurangan. Bukan berarti program tersebut harus ditiadakan, malah yang ada harusnya dibenahi. Baik dari segi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.

"Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok, termasuk rakyat kecil. Kalau dihapus, program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dia menegaskan, penyaluran bansos mesti bisa tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif.

Dia pun mengaku tengah menginisiasi pembentukan Panja Efektivitas Penyaluran Bansos, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR.

"Penyaluran bansos ke depannya perlu dibarengi dengan sistem pengawasan ketat. Jangan sampai program itu hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu," ujarnya.

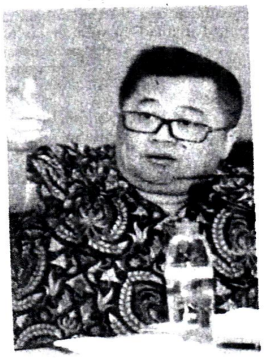

Darmadi Durianto

Darmadi menegaskan, pembentukan panja ini juga sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat. Karena bansos ini menggunakan uang rakyat.

"Sudah jadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran. Oleh karenanya, kami di Komisi VI DPR berencana membentuk Panja Efektivitas Penyaluran Bansos sesegera mungkin," ungkapnya.

Dia mengatakan, dengan adanya panja ini diharapkan penyaluran bansos oleh tiga perusahaan yang ditunjuk Perusahaan Umum (Perum) Bulog dapat berjalan efektif.

Perum Bulog mendapat penugasan untuk mendistribusikan bantuan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.

Dalam pendistribusian tersebut, Bulog menggandeng sejumlah rekanan, yaitu PT Pos Indonesia sebanyak 49 persen, PT Jasa Prima Logistik yang juga merupakan anak usaha Perum Bulog sebanyak 10 persen, dan PT Yasa Artha Manunggal sebanyak 41 persen.

"Komisi VI DPR berharap lewat Panja akan mudah mengawasi distribusi terhadap empat program bantuan pangan yang tengah berjalan senilai Rp 400 triliun tersebut. Jangan sampai di tengah gegap gempita pemilu, bantuan untuk rakyat diselewengkan. Ini harus kita jaga dan antisipasi," tegasnya.

Darmadi menegaskan, PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat jika sudah menyangkut kepentingan wong cilik.

Ditegaskannya, kepentingan wong cilik adalah skala prioritas yang mesti diperjuangkan secara totalitas, termasuk soal program bansos ini.

"Negara ini bukanlah negara yang menganut paham kapitalisme. Rakyat yang tak berdaya dibiarkan berjuang sendirian. Bagi PDIP, bansos adalah program yang memiliki spirit dan nilai-nilai kegotongroyongan sebagaimana menjadi ciri khas bangsa ini, yaitu saling bahu membahu dalam kondisi apapun," tutup anggota Badan Legislasi DPR itu. ■ KAL